

# PENGARUH PERANG KEMERDEKAAN II TERHADAP PENGAKUAN KEDAULATAN RI TANGGAL 27 DECEMBER 1949

Oleh:  
H. Kuswandi <sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal sebagai berikut : bahwa perang kemerdekaan II terjadi sebagai reaksi terhadap agresi Belanda II yang bertujuan untuk menghancurkan dan meniadakan Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945. Puncak perang kemerdekaan II dilakukan melalui perang gerilya berupa serangan Umum I Maret tahun 1949. Perang kemerdekaan II mendapat dukungan dari bangsa-bangsa Asia melalui konfrensi New Delhi yang disepndori oleh India juga dari Negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan inisiatif Amerika Serikat mendapat dukungan pihak Australia. Reaksi dari dunia dari agresi Belanda II disalurkan melalui sidang Dewan Keamanan PBB. Sebagai pengaruh dari resolusi dari Dewan Keamanan PBB tersebut Belanda mengundang Bung Karno maupun PBB untuk segera mengadakan KMB yang diawali dengan persetujuan Roem - Royem yang bertempat di Jakarta. Demikian juga konfrensi antar Indonesia abtara pihak Republik Indonesia dengan BFO yang dilakukan dua kali amok menghadapi KMB. Sebgaai reaksi dari KMB yang sangat bersejarah sesudahnya adalah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pads tanggal 27 Desember 1949.*

***Kata Kunci: Perang Kemerdekaan II, Pengakuan Kedaulatan RI***

## ABSTRACT

*The results showed some of the following: that the war of independence II occurred as a reaction to the Dutch agreasi II, which aims to destroy and negate the results of the Proclamation of the Republic of Indonesia 17 August 1945. The highlight of the independence war II made through guerrilla warfare in the form of general strike in March 1949. War I independence II received support from Asian nations through the New Delhi conference that disepndori by India as well as from Western countries like the United States and the United States initiative has the support the Australian side. Reaction from the world of agreasi Netherlands II channeled through the UN Security Council. As the effect of the resolution of the UN Security Council invite Bung Karno Netherlands and the United Nations to hold a Round Table Conference that begins with the approval Roem - Royem housed in Jakarta. Likewise conference between Indonesia abtara the Republic of Indonesia with BFO conducted twice amok face KMB. Sebgaai reaction of KMB very historic afterward is recognition of the sovereignty of Indonesia by the Dutch pads dated December 27, 1949.*

***Keyword: War of Independence II, recognition of sovereignty***

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda telah melakukan Agresi Militer yang ke II. Dengan penyerangan ter-hadap Maguwo dan pendudukan terhadap Yogyakarta, Belanda bermaksud menghancurkan dan meniadakan Republik Indonesia.

Dengan perbuatannya yang serba mendadak itu, jelas Belanda menginjak-injak perjanjian gencatan senjata yang telah disaksikan Komisi Tiga Negara.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai kehormatan, bangkit mempertahankan kemerdekaan dengan melaksanakan perang gerilya dan serangan umum terhadap kedudukan Belanda. Hal ini

---

Jurnal Artefak Vol. 3 No. 2 – Agustus 2015 [ISSN: 2355-5726]

Hlm: 207 - 220

<sup>1</sup> Dosen Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis

membuktikan bahwa Belanda tidak berhasil menumpas dan menghancurkan Republik Indonesia hasil Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, meskipun para pemimpinnya yaitu Presiden, Wakil Presiden dan beberapa orang menteri tertawan Belanda.

Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 yang mendapat reaksi dari bangsa Indonesia ini, tnalahan menjadi dorongan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk lebih cepat menjadi bangsa yang berdaulat, justru dengan peristiwa tersebut perhatian dunia menjadi lebih tertumpah terhadap Indonesia.

Bangsa-bangsa Asia yang disponsori oleh India bangkit menyelenggarakan Konferensi Asia di New Delhi yang menghasilkan resolusi tentang masalah Indonesia di PBB. Dengan resolusi PBB tentang tindakan Belanda yang melakukan agresi Militernya yang ke II tersebut, maka mulailah dirintis lagi perundingan-perundingan yang kita kenal dengan Roem-Royen, Konferensi Antar Indonesia dan KMB. Dan akhirnya melalui Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag maka pada tanggal 27 Desember 1949 terjadilah peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, yaitu Belanda menandatangani Nota Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode historis, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, digunakan pula metode analisis dokumenter, yaitu suatu telaah sistematis atau catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data (John W. Best, 1982: 133), hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ismaun (1984: 93-94) tentang metode penelitian sejarah, yang terdiri dari:

- 1) Heuristik, yaitu jejak jejak dari sejarah sebagai peristiwa merupakan sumber-sumber sebagai sejarah sebagai kisah
- 2) Kritik, yaitu metode untuk menilai sumber-sumber yang kita butuhkan guna mengadakan penulisan sejarah.
- 3) Interpretasi, yaitu menafsirkan keterangan sumber-sumber sejarah.
- 4) Historiografi, yaitu menyusun cerita sejarah.

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah melalui studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menelaah

bahan-bahan yang ada kaitannya dengan pokok bahasan, sehingga penulis dapat membahas lebih jauh sesuai dengan judul penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Agresi Millier Belanda II**

Untuk memudahkan pembahasan yang diajukan mengenai latar belakang Perang Kemerdekaan II, penulis mencoba menyoroti salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya Agresi Militer Belanda ke II. Yaitu atas ketidak puasan Belanda dari persetujuan Renville yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan tanggal 17 Januari 1948. (Sudharmono, 1981:55)

Ketidak puasan Belanda tersebut sebenarnya telah kita lihat sejak awal perundingan, dimana pihak Belanda banyak menolak saran dari KTN untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB. Pihak Belanda tidak mau merundingkan soal-soal politik selama masalah gencatan senjata belum beres. Perundingan mengalami kemacetan dan akhirnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan keterangan-keterangan sebab terj adinya kemacetan tersebut. Sedangkan Belanda hanya menyatakan persetujuannya pada hal-hal yang menguntungkan saja. (Kartodirdjo, 1975: 51)

Adapun hasil perundingan Renville yang ditanda tangani tanggal 17 Januari 1948 tersebut, terdiri dari 12 pasal prinsip politik, 6 pasal prinsip tambahan dan 10 pasal persetujuan gencatan senjata. (Kartodirdjo, 1975: 359)

Menurut bangsa Indonesia perundingan Renville itu jelas sangat merugikan. Karena isi perjanjian tersebut menempatkan Republik Indonesia kepada kedudukan yang makin bertambah sulit. Wilayah Republik Indonesia makin sempit, sebab dikurung oleh daerah-daerah kedudukan Belanda. Tapi untuk selanjutnya bahwa Belanda selalu berpendapat untuk memojokkan bangsa Indonesia. Menurut laporan Buurman Van Vreeden, para pembesar Republik Indonesia sering kali melanggar ketepatan-ketentuan perjanjian gencatan senjata. Menurut Belanda bahwa pelanggaran tersebut sesuai dengan perintah-perintah para komandan tentara kepada orang-orang Indonesia yang berada di daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Aksi tersebut diantaranya ialah berupa aksi-aksi subversif, ancaman dan terterhadap orang-orang Indonesia yang bekerja sama dengan Belanda. Selain itu juga bahwa pidato-pidato

PENGARUH PERANG KEMERDEKAAN II  
TERHADAP PENGAKUAN KEDAULATAN RI TANGGAL 27 DECEMBER 1949  
**Kuswandi**

yang berupa hasutan sering disiarkan oleh radio RI. Itu semuanya menurut Belanda sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan gencatan senjata. Sedangkan menurut pihak RI bahwa tuduhan-tuduhan Belanda tersebut tidak berhubungan dengan pemerintah Republik Indonesia, karena hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tak termasuk tentara RI dan mereka bertindak atas nama dan tanggungjawab sendiri. (Agung, 1985: 85)

Pemerintah Belanda berpendapat bahwa selama pelanggaran-pelanggaran gencatan senjata terus berlangsung dan Pemerintah RI tak mampu untuk mengakhirinya, maka Belanda tak dapat menjamin berskesinambungannya perundingan. (Agung, 1985: 90)

Alasan lain yang diajukan pemerintah Belanda atas ketidakpuasan dengan persetujuan Renville ialah bahwa RI dianggap telah mengadakan suatu persetujuan atau hubungan dengan Uni Soviet. Menurutnya bahwa wakil RI di Praha yaitu Soeripno telah mengadakan suatu persetujuan konsuler dengan Uni Soviet yang isinya mengadakan tukar menukar pejabat-pejabat konsuler antara Hoskow - Yogya. Menurut Pemerintah Kerajaan Belanda ini merupakan pelanggaran kasar terhadap ayat 1 ke 6 asas tambahan persetujuan Renville. Padahal menurut Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan nota yang diserahkan oleh ketua delegasi Republik Indonesia yaitu Roep dan Sultan Yogya kepada delegasi Belanda tanggal 10 Juni 1948 yang isinya sama dengan jawaban tanggal 28 Mei 1948 dengan tambahan bahwa menurut RI tidak ada pelanggaran terhadap ayat 1 ke 16 tambahan persetujuan Renville. Karena asas ini tak dipandang suatu persetujuan, melainkan hanya dipandang sebagai suatu sarana untuk mencapai persetujuan politik. Republik Indonesia tidak bersedia melepaskan dan menghentikan hubungan-hubungan luar negerinya, sebelum tercapai persetujuan politik. (Kartodirdjo, 1975: 55)

Alasan lain yang diajukan Perdana Menteri Beel pada Menteri Daerah Seberang, bahwa pembicaraan-pembicaraan antara Republik Indonesia dan Negeri Belanda tidak berjalan lancar. Belanda telah menuduh RI menolak plebisit. RI berpendapat bahwa plebisit harus dilaksanakan terutama di daerah-daerah yang dipersengkatakan.

Selain dari hal-hal tersebut tadi, juga Belanda menuduh bahwa keadaan Militer di

Jawa semakin buruk, dan jumlah pelanggaran bersenjata semakin banyak (Kartodirdjo, 1975: 60). Dari uraian tersebut jelas bahwa Belanda tidak puas dengan hasil perundingan Renville, Hal itu terbukti bahwa pada tanggal 11 Desember 1948, Pemerintah Kerajaan Belanda mengeluarkan maklumat resmi tentang perabicarakan antara Indonesia dan Belanda. Adapun isi maklumat tersebut ialah, agar Republik mengubah sikapnya secara radikal dalam pelaksanaan perjanjian Renville. Tindakan lebih jauh dari Belanda ialah Pemerintahan Kerajaan Belanda memberi tahu kepada komisi Tiga Negara, bahwa perundingan antara Indonesia dengan Belanda tidak akan ada hasilnya selama Republik Indonesia tidak menjunjung tinggi persetujuan gencatan senjata (Mulyana, 1969: 272).

Adapun isi nota tanggal 11 Desember 1948 menurut penjelasan Kolonel Nugroho Notosusanto sebagai berikut:

1. Dalam perundingan di Kali Urang ternyata RI tidak mempunyai kekuasaan yang nyata terhadap negaranya, karena itu tidak dapat diharapkan kerja sama yang sungguh-sungguh untuk mencegah pelanggaran persetujuan gencatan senjata.
2. Pendirian terhadap Wakil Tinggi Mahkota, terutama mengenai kekuasaan terhadap tentara di masa peralihan, bertentangan dengan kedaulatan Belanda yang ditetapkan dalam bagian pertama pokok-pokok azasi persetujuan Renville, yang berarti berlangsungnya keadaan yang tak dapat dipertahankan, dimana ada dua tentara yang saling berhadapan dibawah pimpinan yang terpisah.
3. Penolakan mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan menyebabkan tidak adanya RI menerima naskah persetujuan yang direncanakan KTN dan Amerika Serikat pada tanggal 10 September sebagai bahan perbandingan.
4. Pemerintah Belanda harus bertindak melaksanakan keputusan pembentukan Pemerintahan Interim yang direncanakan atas dasar persetujuan wakil-wakil daerah federal. (Notosusanto, 1985: 32)

Pada tanggal 13 Desember 1948, PM Hatta meminta kepada KTN agar diadakan kembali perundingan dengan pihak Belanda dengan syarat "Kesediaan Republik Indonesia

mengakui sepenuhnya kedaulatan Belanda selama masa peralihan". Namun pada hari itu juga Pemerintahan Kerajaan Belanda menjawab bahwa perundingan tidak akan diadakan lagi. (Notosusanto, 1985: 32)

Sesuai dengan telegram yang dikirimkan Beel pada tanggal 10 Desember 1948 kepada Menteri wilayah Seberang Lautan dimana ia mendesak agar dilancarkan segera aksi militer Belanda terhadap Indonesia. Adapun maksud dari Beel dengan mengusulkan suatu aksi militer tersebut dengan tujuan sebagai berikut:

1. Agar Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan ketatanegaraan harus dihancurkan sehingga habis riwayatnya. Karena itu aksi yang dilaksanakan harus secara total dan jangan merupakan aksi sebagian-sebagian.
2. Beel bermaksud membentuk Pemerintah Interin Vederal yang didasarkan atas peraturan pemerintahan dalam peralihan, dimana wakil-wakil dari daerah-daerah Vederal dan unsur-unsur Kooperatif dan Moderat dari bekas Republik harus mengambil bagian.

Sasen mengirimkan telegram kepada Beel dengan keputusan dari Pemerintah Kerajaan Belanda untuk melaksanakan aksi pada malam tanggal 18 Desember pukul 00.1. Jika mungkin laksanakan pada tanggal 16 Desember 1948. Tapi sehubungan ada surat dari Hatta tadi maka sempat menimbulkan keraguan dan bahan pertimbangan pemerintah Belanda tentang pelaksanaan agresi. Tapi karena desakan dari Beel maka akhirnya pada tanggal 17 Desember 1948 Pemerintah Belanda melalui Beel mengirimkan nota kepada KTN di Kaliurang.

Nota tersebut diterima pukul 15.15. dan Elink Schuurman mengirim telegram kepada Cochran bahwa paling lambat hari Sabtu tanggal 18 Desember 1948 sebelum jam 10 pagi jawaban Hatta harus sudah diterima. Sehubungan dengan batas waktu yang sangat singkat itu, maka nota Belanda tersebut merupakan ultimatum, sehingga Cochran sangat marah dan menjawab surat dari Belanda tersebut dengan rasa kesal dan jengkel. Belanda yang memang sudah mengetahui keadaan Republik yang sudah begitu lemah akibat pemberontakan PKI bulan September 1948, maka sesudah mengadakan ultimatum Belanda melakukan agresi militernya yang ke II

kepada Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1943. (Reksodipuro, 1982: 82).

Pada tanggal 19 Desember 1948, kira-kira jam 05.30 bergemuruhlah deru pesawat pembom Mithell B-25 memecah ketenangan di pagi hari itu. Pesawat-pesawat pembom itu makin lama makin banyak saja, dan berputar-putar mengelilingi kota Yogyakarta, yaitu Ibukota Republik Indonesia. Belanda menjatuhkan berpuluh-puluh bom di lapangan terbang Maguwo dan tentu saja hal itu merupakan malapetaka dan menimbulkan maut yang tidak sedikit di pihak Republik. Selain itu juga dibarengi dengan meluncurnya kendaraan-kendaraan perang dengan merk perdagangan Ford. Kendaraan-kendaraan itu muat serdadu yang dilengkapi dengan alat-alat perang Amerika Serikat dan Inggris menerobos garis

### **Pengaruh Perang Kemerdekaan II**

Perang Kemerdekaan II yang terjadi akibat Agresi Millter Belanda II tanggal 19 Desember 1948, ternyata telah membuntukan Belanda dalam menghancurkan dan meniadakan Republik Indonesia hasil Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Kaum Kolonialis Belanda telah gagal dalam melaksanakan praktek kekerasan senjata, mereka tidak mampu menghadapi perlawanan rakyat semesta di bawah bimbingan TNI. Terpaksa Belanda mencari jalan lain yaitu membuka kembali perundingan dengan Pemerintah Indonesia, setelah perbuatannya dikecam dunia internasional umumnya dan bangsa Asia Afrika pada khususnya.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, maka uluran tangan Belanda untuk mengajak berunding kita terima. Dengan diawali oleh persetujuan Roem-Royen, ternyata akhirnya kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pelik akibat Agresi Militer Belanda II dengan cukup berhasil.

### **Persetujuan Roem- Yoyen**

Pada bulan-bulan pertama setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II, Belanda mengadakan pendekatan-pendekatan politik. Perdana Menteri Belanda Dr. Drees mengundang Prof. DR. Supomo salah seorang anggota Delegasi RI dalam perundingan lanjutan Renville untuk berunding. Undangan tersebut diterima oleh Indonesia dan merupakan pertemuan pertama setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II. (Kartodirdjo, 1975: 63).

PENGARUH PERANG KEMERDEKAAN II  
TERHADAP PENGAKUAN KEDAULATAN RI TANGGAL 27 DECEMBER 1949  
**Kuswandi**

Untuk menutupi kealahannya dalam perdebatan internasional, pihak Belanda mengadakan kontra usul sebagai usaha untuk melepaskan diri dari pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan. Pemerintah Belanda mengirimkan undangan kepada Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menghadiri KMB yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 1949 di Negeri Belanda. Adapun maksud dari Konferensi tersebut adalah untuk menyerahkan kedaulatan Indonesia secepat-cepatnya kepada suatu pemerintah perederal yang dianggap mewakili Indonesia. Dalam KMB tersebut akan dibahas Uni - Indonesia Belanda dan peraturan peralihan sampai saat penyerahan. Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa diminta agar memberikan jasa baiknya untuk pelaksanaan cita-cita tersebut. Untuk memenuhi Resolusi Dewan Keamanan, para pemimpin yang ditawan akan dibebaskan. (Mulyana, 1969: 288)

Bersamaan itu juga pemerintah Belanda mengutus Dr. Koets sebagai wakil tinggi Mahkota Belanda untuk menemui Bung Karno bersama para pembesar lainnya yang sedang ditawan di Bangka. Dr. Koets pergi ke Bangka pada tanggal 28 Februari 1949 kedatangannya untuk menjelaskan maksud Pemerintah Belanda mengundang Bung Karno untuk menghadiri KMB di Den Haag. Isi penjelasan yang disampaikan kepada Bung Karno, menurut penjelasan Kolonel Nugroho Notosusanto adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda akan mengadakan KMB di Den Haag guna membahas "Penyerahan" kedaulatan dipercepat.
2. Penarikan pasukan-pasukan Belanda secepat-cepatnya setelah "Penyerahan" kedaulatan.
3. Tentang pengembalian Pemerintah RI ke Yogya, dinyatakan bahwa hal itu mungkin dilaksanakan (Notosusanto, 1985: 36)

Sebelum hal itu terjadi, pada tanggal 21 Januari 1949 terjadi pertemuan antara delegasi BPO yang terdiri dari Mr. Djumhana serta Dr. Ateng dengan Presiden Sukarno dan wakil Presiden Moh. Hatta. Menurut Moh. Hatta, bahwa perundingan dapat saja dimulai dengan syarat dikembalikannya pemerintah RI ke Yogyakarta dan pemunduran pasukan Belanda dari wilayah RI sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan. Keinginan Moh.

Hatta itu akhirnya disetujui dan didukung oleh BFO. (Kartodirjo, 1975: 64)

Pada perinsipnya Presiden Sukarno yang masih ada dalam tawanan di Bangka itu menerima undangan tersebut, tetapi undangan itu hanya bersifat perorangan dan bukan sebagai Kepala Negara RI. Yang menjabat Kepala Pemerintah Darurat RI adalah Syafrudin Prawiranegara, maka menurut Bung Karno segala kekuasaan mengenai Negara ada di tangannya. Dalam urusan kenegaraan Sukarno dan Syafrudin Prawiranegara selalu mengadakan kunjungan untuk menghindari segala kemungkinan kesulitan dimasa depan. Syafrudin Prawiranegara cukup menunjukkan kesetiiaannya kepada Presiden Sukarno, sehingga beliau selalu berpendapat sama dengan Bung Karno, bahwa untuk ikut serta dalam perundingan Meja Bundar itu harus didahului oleh Pembebasan tanpa syarat para pembesar RI yang di tawan di Bangka dan pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta, sesuai dengan bunyi resolusi Dewan Keamanan PBB. (Mulyana, 1969: 288)

Pada tanggal 3 Maret 1949 Presiden Sukarno mengadakan pembicaraan dengan penghubung BFO, dan beliau menegaskan tentang perlunya kedudukan Pemerintah RI di pulihkan sebagai syarat dilangsungkannya perundingan yang selaras dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 4 Maret 1949, Presiden Sukarno membalas undangan Wakil Tinggi Mahkota Belanda yang berisi penolakan menghadiri KMB, kecuali dengan syarat sebagai berikut:

1. pengembalian kekuasaan RI adalah syarat mutlak untuk memulai perundingan.
2. kedudukan dan kewajiban komisi PBB untuk Indonesia dalam membantu pelaksanaan resolusi PBB tidak terganggu. (Kartodirjo, 1975: 65).

Jawaban Presiden tersebut mendorong pemerintah Belanda menunda pelaksanaan KMB, serta meninjau kembali tentang penolakan kembalinya Pemerintah Republik di Yogyakarta. Dari BFO juga dikeluarkan pernyataan yang berisi:

1. Supaya Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Korftisi PBB untuk Indonesia agar membantu raelaksanakan Resolusi.
2. RI memerintahkan gencatan senjata. (Notosusanto, 1986: 36)

Dari pihak Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 23 Maret 1949 PBB mengirimkan kawat kepada Pemerintah Belanda, yang menyatakan bahwa Komisi PBB untuk Indonesia telah bekerja sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949. Menurut Dewan Keamanan PBB bahwa hal tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Komisi PBB akan memberikan bantuan tentang tercapainya persetujuan sebagai pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari paragraf 1 dan 2 yakni penghentian aksi Militer oleh Belanda dan pengembalian Pemimpin RI ke Yogyakarta. Selain itu juga Dewan Keamanan PBB menetapkan tanggal dan waktu untuk mengadakan KBS di Den Haag dan agar diselenggarakan selekasnya. (Notosusanto, 1986: 65)

Dewan Keamanan PBB pada bulan Maret 1949 telah mengadakan Sidang, dan atas usul Kanada bahwa Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa mempunyai kewajiban membantu kedua belah pihak untuk mencapai persetujuan dalam usaha melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949. Berdasarkan keputusan tersebut di atas, maka segera diadakan undangan untuk pembicaraan pendahuluan di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB melalui Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa. Adapun bunyi surat tersebut menurut penjelasan Prof. DR. Slamet Mulyana adalah sebagai berikut adalah:

1. Menerima baik undangan tersebut, pertemuan di-adakan di Jakarta dibawah Pengawasan Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa.
2. Karena pihak Belanda belum menyatakan kesediaannya untuk mengendalikan pemerintah Republik di Yogyakarta, mungkin penerimaan baik itu akan menimbulkan salah faham pada pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dan di luar Indonesia serta dikalangan rakyat.
3. Oleh karena itu akan mempersulit penyelesaian pertikaian, turut sertanya dalam pembicaraan bersifat terbatas.
4. Pada tanggal 19 Desember 1948 kekuasaan Republik telah diserahkan kepada Pemerintah Darurat di Sumatera yang harus bertindak atas nama Pemerintah Republik sampai saat Pemerintah Republik merdeka untuk

berkumpul lagi, Sebagaimana tersebut dalam laporan Komisi kepada Dewan Keamanan tanggal 1 Maret dan seperti pula ditegaskan oleh sejumlah pembicara dalam Dewan Keamanan, pengembalian Republik adalah syarat penting untuk dapat mengadakan pembicaraan yang akan berhasil, karena hanya dengan demikian Pemerintah Republik dapat memutuskan sesuatu secara Merdeka, lepas dari suatu tekanan,

5. Oleh karena itu pembicaraan pada permulaan hanya mengenai pengembalian Pemerintah Republik ke Yogya sampai ke-detail 2 yang praktis.
6. Untuk memperoleh keterangan-keterangan sebagai bahan perundingan diperlukan bantuan Sri Sultan Hamengkubowono IX. (Mulyana, 1969: 290)

Dengan adanya surat dari Roem maka Dewan Keamanan memberikan petunjuk baik kepada Republik maupun kepada Belanda. Sesudah adanya pendekatan politis antara pihak Republik Indonesia dan Belanda, maka pada tanggal 14 April 1949 atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia diadakan perundingan antara RI-Belanda. Perundingan tersebut dilakukan di Hotel Des Indes Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran. Delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sebagai ketua Mr. Ali Sastroamidjyo sebagai wakil ketua, dan anggotanya ialah: Dr. Leimena, In Juanda, Prof. Mr. Dr. Supomo, Mr. Latuhahary disertai 5 penasihat. Dari Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. T. H. Van Royen dengan anggota-anggotanya; Mr. U. S. Blom, Mr. A. S. Jacob, Dr. J. J. Van der Velde dan empat orang penasihat. (Notosusanto, 1986: 37)

Pada kesempatan ini Merle Cochran, yang memimpin perundingan berpidato dengan singkat tentang gambaran tujuan Konperensi dan tugas yang harus dilaksanakan oleh Komisi dalam Konperensi tersebut. Beliau mengingatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa pertama-tama harus tercapai persetujuan mengenai paragraf 1 dan 2 Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949, juga setelah itu harus dirundingkan mengenai syarat-syarat dan tanggal KMB yang akan dilaksanakan di Denhag (Agung, 1985: 268)

Selanjutnya ketua Delegasi Belanda, Pam-Royen berpidato. Adapun isi pidatonya

PENGARUH PERANG KEMERDEKAAN II  
TERHADAP PENGAKUAN KEDAULATAN RI TANGGAL 27 DECEMBER 1949  
**Kuswandi**

sebagaimana yang diutarakan oleh Ide Agung Anak Agung adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda telah menerima undangan komisi untuk Konperensi persiapan ini tanpa syarat .
2. Pemerintah Belanda bersedia menempatkan soal kembalinya Pemerintah Republik ke Yogya sebagai pasal pertama acara yang akan dibicarakan dengan syarat bahwa hasil-hasil perundingan ini hanya akan mengikat seandainya tercapai kata sepakat mengenai kedua pokok acara, yakni soal penghentian permusuhan dan pemilihan ketertiban dan ketentraman, serta syarat-syarat dan tanggal untuk mengadakan Konperensi Meja Bundar di Den Haag.
3. Kembali kepada usul Belanda mengenai penyerahan kedaulatan yang dipercepat, Pan-Royen mengatakan, bahwa ini akan bersifat tanpa syarat nyata dan lengkap, sedangkan Uni-Indonesia-Belanda tak lean menjadi Paramanagara (Super State) melainkan hanya merupakan suatu bentuk kerja sama antara negara-negara yang berdaulat, Indonesia dan Belanda atas dasar persamaan dan kesukarelaan sepenuhnya. (Agung, 1985: 269)

Setelah itu, kemudian ketua delegasi dari Indonesiapun berpidato pula. Adapun bunyi pidato daro Mr.Moh. Roem adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik dengan menyesal harus menyatakan bahwa aksi militer Belanda yang ke II, telah menggoyahkan kepercayaan pada itikad baik Pemerintah Belanda, reaksi negatif ini tidak saja terlihat di dalam Republik, melainkan terlihat pula di luar Republik, seperti telah ternyata diletakkannya jabatan oleh Pemerintah Indonesia Timur dan Pemerintah Pasundan serta dari Resolusi badan-badan Perwakilan Madura, Jawa Timur dan lainlain yang menyalahkan tindak tanduk Militer itu. Tambahan pula terdapat pula reaksi keras dari luar negeri, yakni Konperensi New Delhi yang oleh negara-negara Asia Selatan dan Tenggara.
2. Pemerintah Republik tidak berpendapat, bahwa pokok-pokok hal yang disebut

dalam intruksi Dewan Keamanan tanggal 23 Maret sebagai pokok-pokok untuk dibicarakan dalam Konperensi ini, merupakan kesatuan utuh. Harus dibicarakan terlebih dahulu tentang kembalinya pemerintah Republik ke Yogya. Setelah tercapainya kata sepakat tentang hat ini, maka mudahlah untuk membicarakan pokok-pokok hal yang lain untuk suatu pemecahan menyeluruh. Keputusan-keputusan yang hakiki kemudian akan diambil oleh pemerintah Republik di Yogya. Pemerintah Republik dengan tulus mengharap agar, bila tercapai kata sepakat tentang kembalinya Pemerintah Republik, jalan akan terbuka untuk mengadakan perundingan-perundingan mendasar dan kepercayaan yang tergoyah akan dipulihkan. (Agung, 1985: 30)

Setelah perundingan pertama, ternyata jalannya perundingan sangat lamban, karena masing-masing pihak berpegang pada pendiriannya. Perundingan hampir mengalami jalan buntu, untunghlah pada tanggal 24 April Drs. Moh. Hatta datang ke Jakarta. Akhirnya pihak Republik menempuh cara lain, yakni mengadakan pertemuan informal dan langsung dengan pihak Belanda yang disaksikan oleh Merle Cochram. Pada tanggal 25 April 1949 diadakan pertemuan antara Drs. Moh. Hatta dengan ketua delegasi Belanda Dr. Pan-Royen dan hasilnya tidak diumumkan. Perundingan semacam itu juga dilakukan oleh Ketua Delegasi RI dengan Ketua Delegasi Belanda sebanyak 2 kali yakni tanggal 28 April dan 4, 5 Mei 1949. (Kartodirjo, dkk., 1975: 66)

Berkat kerja keras dari UNCI, akhirnya pada tanggal 6 Mei 1949 mulailah tampak tahap terakhir perundingan Roem Royen. Dan akhirnya tercapailah persetujuan yang kemudian terkenal dengan persetujuan RoenRoyem. Adapun isi dari perundingan Roen-Royen sebagaimana dikemukakan Drs. Sardjono dkk adalah sebagai berikut:

1. Statemen Delegasi Republik Indonesia (Diucapkan oleh Mr. Roem)

Sebagai ketua delegasi Republik saya diberi kuasa oleh Presiden Sukarno dan wakil Presiden Moh. Hatta, untuk menyatakan kesanggupan mereka sendiri, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan

tertanggal 28 Januari 1949 untuk memudahkan tercapainya:

- a. Pengeluaran perintah kepada pengikut-pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
  - b. Kerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
  - c. Turut serta dalam Konperensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat, dengan tidak bersyarat.
2. Statement Delegasi Belanda (Diucapkan oleh Ban-Royen)
- a. Delegasi Belanda diberi kuasa menyatakan bahwa, berhubung dengan kesanggupan yang baru saja diucapkan oleh Mr. Moh. Roem ia menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Delegasi Belanda selanjutnya menyetujui pembentukan satu panitia bersama atau di bawah perlindungan UNCI dengan maksud:
    - 1) Mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
    - 2) Mempelajari dan memberi nasihat tentang tindakan-tindakan yang diambil untuk melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
  - b. Pemerintah Belanda setuju bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan jabatannya yang sepatutnya dalam satu daerah yang meliputi Kepresidenan Yogyakarta dan bahwa ini adalah satu langkah yang dilakukan sesuai dengan maksud petunjuk Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949.
  - c. Pemerintah Belanda menguatkan sekali lagi kesanggupannya untuk menjamin penghentian segera dari pada semua gerak-gerakan militer dan membebaskan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik yang ditangkap sejak 19 Desember 1948 dalam Republik Indonesia.
  - d. Dengan tidak mengurangi hak bagian-bagian bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai yang diakui dalam azas-azas Linggarjati dan Renville. Pemerintah Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara atau daerah-daerah di atas yang dikuasai oleh Republik sebelumnya tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan daerah Republik Indonesia tersebut.
  - e. Pemerintah Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai staat yang nanti akan duduk dalam negara Indonesia Serikat. Apabila suatu badan perwakilan sementara untuk Indonesia dibentuk dan karena itu perlu ditetapkan jumlah perwakilan Republik dalam badan tersebut, jumlah itu ialah separoh dari pada jumlah anggota-anggota semua di luar anggota-anggota Republik.
  - f. Sesuai dengan maksud dalam petunjuk Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949 yang mengenai Konperensi Meja Bundar di Den Haag supaya perundingan-perundingan yang dimaksud oleh resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dapat diadakan secepat-lekasnya, maka Pemerintah Belanda akan berusaha sesungguhnya agar Konperensi itu segera diadakan sesudah Pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Pada Konperensi itu perundingan akan diadakan tentang cara bagaimana mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat sesuai dengan azas-azas Renville.
  - g. Berhubung dengan keperluan kerja sama dalam hal pengembalian perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan Pemerintah Belanda setuju bahwa dalam segala daerah di luar keresidenan Yogyakarta dimana pegawai Sipil, Polisi dan pegawai Pemerintah Indonesia (Pemerintah Belanda di Indonesia) lainnya sekarang tidak bekerja maka pegawai Sipil, Polisi dan pegawai Republik Indonesia lainnya masih terus bekerja, akan tetapi dalam jabatan mereka. Dengan sendirinya pembesaran-pembesaran Belanda membantu pemerintah Republik dalam hal keperluan-

keperluan yang dikehendaki menurut pertimbangan yang pantas untuk perhubungan dan Konsultasi dengan segala orang Indonesia terhitung juga mereka yang bekerja dalam jabatan Sipil dan Militer Republik, dan detail-detail teknik akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak di bawah pengawasan LJNCI. (Sardjono, dkk., 1982: 95)

Demikianlah isi dari perundingan Roem-Royen sebagai hasil perjuangan para Delegasi Republik, yang telah membawa Republik ke ambang pintu yang setarap dengan negara-negara merdeka lainnya di dunia.

Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Roem-Royen tersebut, Pemerintah Darurat RI di Sumatera memerintahkan kepada Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari pihak Belanda. (Notosusanto, 1986: 159)

### **Konferensi Antar Indonesia**

Setelah adanya pernyataan Roem-Royen, maka diadakan persiapan-persiapan untuk kembalinya Pemerintah Republik ke Yogyakarta dan mengambil tindakan-tindakan untuk menghentikan permusuhan-permusuhan. Persiapan-persiapan itu sudah sedemikian maju hingga Pemerintah Belanda memberikan perintah-perintah kepada pasukannya untuk mengosongkan Keresidenan Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1949.

Pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta tiba di Yogyakarta dari tempat pengasingannya di Bangka (Mulyana, 1969: 258). Setelah para Pemimpin Republik berkumpul kembali di Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diadakanlah Sidang Kabinet yang pertama. Pada kesempatan tersebut Mr. Spaf-rudin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden yaitu Moh. Hatta. Dan dalam Sidang Kabinet itu, diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan Koordinator Keamanan. (Notosusanto: 1985: 43)

Sejak timbul Perang Kemerdekaan II tanggal 19 Desember 1948, kehidupan politik di Yogyakarta telah beralih ke Wilayah di luar Republik. Komisi BFO sibuk mengadakan pertemuan-pertemuan raembahas penetapan Pemerintah Belanda dalam hal pembentukan Pemerintah Federal Nasional untuk seluruh

Indonesia dalam masa peralihan sebelum terbentuk Indonesia Serikat. Komisi BFO tersebut telah mengadakan hubungan dengan para pemimpin Indonesia yang ditahan di Prapat maupun di Bangka.

Sejak tanggal 6 Juli 1949 dimana para Pemimpin Republik Indonesia telah dikembalikan, maka diadakan kembaliperundingan-perundingan antara pemimpin BFO dan pemimpin Republik mengenai pembentukan sementara Negara Indonesia Serikat. Dan pada tanggal 16 Juli 1949 BFO menerima baik usul Presiden Sukarno untuk melakukan Konferensi antar Indonesia, demi pembentukan Pemerintah sementara dalam masa peralihan. Perundingan diadakan dua kali, perundingan pertama di Yogyakarta pada tanggal 19 s.d. 22 Juli 1949 dan yang kedua berlangsung di Jakarta sejak tanggal 31 Juli 1949. (Mulyana, 1969: 297)

Adapun isi pertemuan pertama yang dilakukan di kota perjuangan tersebut adalah tentang pertahanan. Konferensi antar Indonesia itu merupakan Konferensi pendahuluan sebelum dilangsungkannya Konferensi Meja Bundar. Adapun tujuan Konferensi antar Indonesia ini adalah untuk mengadakan "11 Dialog Indonesia" antar para pemimpin Republik dan para Kepala Pemerintah daerah-daerah yang bekerja sama dalam hubungan pertemuan musyawarah Federal agar tercapai kata sepakat tentang persoalan-persoalan yang sangat mendasar yang akan dibicarakan dalam KMB yang akan datang. Dengan cara ini maka pasal-pasal sengketa yang mungkin ada dapat dibicarakan dahulu antara Republik dengan pertemuan musyawarah Federal. Adapun tujuan Konferensi antar Indonesia menurut Anak Agung Gde Agung adalah sebagai berikut:

1. Menghubungkan Pemerintah-pemerintah, seandainya kasus ini timbul (*casu quo*) tata praja daerah-daerah yang terorganisasi secara ketatanegaraan di luar Republik, yang bekerja sama di dalam pertemuan musyawarah Federal dengan Pemerintah Republik, agar tercapai kerja sama antara Indonesia secara umum mengenai perkembangan politik selanjutnya, terutama pembicaraan pada KMB.
2. Membicarakan garis-garis pokok tata negara sementara RIS, agar setelah KMB, Pemerintah Indonesia pertama akan disusun, dan Pemerintah itulah yang

akan mengambil alih kedaulatan Indonesia.

3. Melakukan musyawarah-musyawarah tentang kemungkinan menyusun pemerintah Indonesia yang akan datang. (Agung, 1985: 284)

Menurut kutipan di atas jelaslah, bahwa tujuan diadakannya Konperensi antar Indonesia itu adalah untuk mengadakan "Dialog Indonesia" seperti dijelaskan penulis pada bagian di atas

Dengan berjalannya Konperensi antar Indonesia antara BFO dengan Republik Indonesia hal ini memperlihatkan bahwa politik *divide et impera* Belanda dalam memisahkan daerah-daerah di luar Indonesia akhirnya mengalami kegagalan. Pada Konperensi antar Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta itu dapat dihasilkan mengenai bentuk dan hal-hal yang tertalian dengan ketatamegaraan Indonesia Serikat (Kartodirdjo, 1975: 70). Adapun isi Konperensi antar Indonesia tersebut untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagaimana penjelasan Sartono Kartodirdjo dkk sebagai berikut:

1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasar kan demokrasi dan Federalisme.
2. RIS akan dikepalai seorang Presiden dibantu oleh Menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Semesta

Di bidang Militer juga telah tercapai persetujuan:

1. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional. Presiden RIS adalah Panglima tertinggi Angkatan Perang.
2. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh Pemerintah RIS dengan inti Angkatan Perang RI (TNI), bersamasama dengan bangsa Indonesia yang ada dalam KNIL, ML, KM, VB dan Territoriale Bataljons.
3. Bada permulaan RIS, Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS. (Kartodirdjo, 1975: 71)

Melihat kutipan di atas, maka jelaslah sekarang, bahwa antara Republik dengan BFO terjalin suatu kerja sama yang menggambarkan kesatuan pendapat dalam hal menentukan nasib Indonesia dimasa yang akan datang. Konperensi antar Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1949 yang dipimpin oleh Mohamad Hatta yang membahas masalah pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Kedua pihak setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konperensi Meja Bundar. (Notosusanto, 1985: 43)

Pada pembukaan ditandaskail bahwa Indonesia hanya akan dapat mempertahankan diri atas dasar-dasar demokrasi dan dengan cara pemerintahan yang didukung oleh rasa tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Konperensi babak ke dua ini telah membahas dasar-dasar yang telah dicapai dalam babak ke satu di Yogya dan merumuskan secara terperinci mengenai; Ketata negaraan, keuangan, perekonomian, keamanan, agama, kebudayaan, pengajaran, dan pendidikan. Telah ditetapkan bahwa bendera Republik Indonesia Serikat ialah sang Merah Putih, lagu kebangsaannya ialah lagu Indonesia Raya, dan bahasa resrainya adalah bahasa Indonesia. (Mulyana, 1985: 300)

Konperensi antar Indonesia ini kalau dilihat hasilnya, pada intinya merupakan persiapan untuk mencari kata sepakat antara Republik Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dengan BFO dalam menghadapi Konperensi Meja Bundar.

### **Konferensi Meja Bundar**

Sebagaimana penulis kemukakan pada bagian terdahulu, bahwa akibat perang kemerdekaan II yang terjadi sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda II itu, membawa pengaruh terhadap situasi politik maupun keamanan yang berlangsung di Indonesia. Selain itu juga aksi militer Belanda II tersebut mendapat reaksi dari luar negeri Indonesia. Turut campurnya Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda tersebut, membuktikan bahwa persoalan Indonesia-Belanda itu sudah menjadi persoalan dunia. Beberapa perundingan berhasil diselenggarakan, seperti halnya perundingan Roem-Royen, Konperensi antar Indonesia dan akhirnya terlaksana pula

PENGARUH PERANG KEMERDEKAAN II  
TERHADAP PENGAKUAN KEDAULATAN RI TANGGAL 27 DECEMBER 1949  
**Kuswandi**

perundingan yang paling menentukan yaitu Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag.

Pada tanggal 3 Agustus 1949, Menteri Seberang Lautan Belanda yaitu Van Marseven berpidato di Majelis Rendah Belanda. Di sana ia memaparkan bahwa Konferensi pendahuluan yang dilaksanakan di Jakarta berhasil dengan baik pada tanggal 1 Agustus 1949. Tentang ketiga pasal acara Konferensi itu yakni tentang kembalinya dan di pulihkannya kekuasaan Pemerintah Republik di Yogyakarta, perintah penghentian tembak menembak untuk mengakhiri permusuhan serta persiapan-persiapan dalam menentukan waktu KMB telah tercapai kata sepakat sepenuhnya. Demikian pula tentang syarat-syarat untuk mengikuti dan melaksanakan KMB telah mencapai kata sepakat pula Dokumen-dokumen mengenai. diakhirinya permusuhan telah di sahkan oleh Pemerintah Republik dan pada tanggal 3 Agustus telah diumumkan serentak di Yogyakarta. (Agung, 1985: 287)

Delegasi dari tiap-tiap negara telah bersiap-siap untuk pergi ke Den Haag. Untuk Delegasi Indonesia telah tersusun dengan baik pada tanggal 4 Agustus 1949. Delegasi Indonesia terdiri dari Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr Mr. Supomo, Dr. Leimena, Mr. Ali Sostromajoyo, In Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Dr. Sumitro, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel Simatupang, Mr. Sumardi. (Agung, 1985: 287)

Selain Kolonel Simatupang dari pihak Militer juga Komodor Surjadarma. Kolonel Subyapto dari Angkatan Laut dan Sukanto sebagai Kepala polisi Negara juga ikut menjadi Delegasi RI. (Nutosusanto, 1985: 43)

Demikian juga dari pihak BFO telah terbentuk dan telah siap berangkat ke Den Haag. Ada pun wakil dari BFO adalah Sultan Hamid XI, Kolonel Sugondo, Kapten Tahya, dan Mr. Maksum Sumadipraja (Mulyana, 1969: 43)

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hfstta bertolak dari Indonesia tanggal 6 Agustus 1949. Rombongan akan singgah dulu di New Delhi karena ingin bertemu dulu dengan Perdana Menteri India Yawa Harlal Nehru yang banyak jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, baik dalam sidang Dewan Keamanan PBB maupun dalam Konferensi di New Delhi. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia Ketua

Delegasi akan menyampaikan dulu ungkapan rasa terima kasih (Agung, 1985: 289)

Pada tanggal 15 Agustus 1949 semua keputusan telah hadir di Den Haag. Meneka diberi tempat menginap sesuai dengan Hotel-hotel yang ada yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Belanda. Komisi PBB untuk Indonesia pun tidak pasif, sambil menunggu pembukaan KMB maka para ketua dan Wakil Ketua Delegasi Republik, Belanda dan pertemuan musyawarah Federal telah mengadakan pembicaraan yang tidak resrai dengan ketiga Komisi PBB untuk Indonesia. Hal itu diantaranya membicarakan masalah Organisasi dan Pimpinan Konferensi Meja Bundar yang akan dimulai tanggal 23 Agustus 1949.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar dimulai di Den Haag. Sidang pembukaan resmi KMB diakhiri dengan menerima baik peraturan tata tertib dan pemilihan seorang ketua, wakil ketua dan Sekretaris asal Irian Barat itu sebetulnya sebelum maju ke KMB juga sudah dipersoalkan. Mulai dari Konferensi Malino sampai ke Konferensi Den Pasar, sudah ada tanda-tanda dari pihak Belanda bahwa mereka hendak memisahkan Irian Barat dari wilayah Negara Indonesia bagian Timur. Maka ketika dalam KMB Belanda mempertahankan dengan keras mengenai Irian Barat di Indonesia terutama dibagian Timur timbul berbagai reaksi dari masyarakat yang menuntut agar Irian Barat tidak dipisahkan dari wilayah bagian Indonesia lainnya. Dalam Pariemen NIT telah di-terima mosi dengan suara bulat pada tanggal 26 Oktober 1949 yang menuntut agar Irian Barat tetap berada dalam wilayah RIS. (Nalenan, 1981: 195)

Mengenai Komisi keuangan dan ekonomi, komisi ini juga dibagi dalam beberapa sub komisi yang mendapat tugas untuk mengurus berbagai hal seperti utang piutang, kewajiban-kewajiban timbal balik hak-hak, penanaman modal, azas-azas politik ekonomi pada umumnya, perjanjian-perjanjian dan soal-soal moneter. (Agung, 1985: 308)

### **Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia**

Sebagaimana penulis kemukakan pada bagian terdahulu, bahwa pada tanggal 16 Nopember 1949 Perdana Menteri Hatta telah menyampaikan laporan hasil-hasil KMB kepada Kabinet. Dengan suara bulat Sidang Kabinet

menerima baik hasil KMB tersebut, meskipun disana sini masih ada kritik-kritik yang menyatakan bahwa delegasi Indonesia terlalu banyak memberikan konsesi kepada delegasi Belanda. (Mulyana, 1969: 302)

Hasil KMB tersebut kemudian diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat untuk diklarifikasi. KNIP menerima hasil KMB tersebut setelah melakukan persidangan pada tanggal 6 Desember sampai tanggal 14 Desember 1949.

Pada tanggal 16 Desember tahun 1949 dilaksanakan pemilihan Presiden di Yogyakarta oleh Wakil-wakil Negara bagian RIS. (Nalena, 1981: 199) Dengan suara bulat ternyata Bung Karno terpilih menjadi Presiden RIS pertama dan dilantik di Bangsal Setinggil Yogyakarta. Dan sebagai wakil Presiden RIS ialah Drs. Moh. Hatta dan juga terpilih sebagai Perdana Menteri RIS dan menjadi Menteri Luar Negeri. Adapun mengenai program Republik Indonesia Serikat itu salah satunya diantaranya ialah menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia itu terjadi dengan seksama.

Demikian juga dimengerti Belanda, pada tanggal 22 Nopember 1949 telah terjadi penyampaian rencana Undang-Undang penyerahan Kedaulatan kepada Majelis Rendah, termasuk juga penyampaian semua persetujuan dan surat menyurat KMB. Di Majelis Rendah itu terjadi pula perdebatan yang menyatakan bahwa status Uni yang menurut mereka hanyalah status yang ringan seperti kapas saja. Karena itu mengenai status Uni yang telah menjadi keputusan KMB tersebut menjadi bahan kritik bagi para peserta sidang majelis Rendah Belanda. Tapi akhirnya Menteri Van Marseven menyatakan dengan tandas bahwa tidak ada kemungkinan lain bagi pemerintah Belanda kecuali menerima persetujuan-persetujuan itu. Karena hal tersebut akan memberi jaminan-jaminan yang paling baik kerja sama yang tetap dengan Republik Indonesia (Agung, 1985: 320).

Pada tanggal 19 Desember 1949, rencana Undang-Undang mengenai pengakuan kedaulatan dibicarakan dalam Sidang Majelis Tinggi Belanda. Dalam kesempatan ini tidak lagi terjadi perdebatan-perdebatan yang melahirkan pandangan-pandangan baru. Praksi-praksi yang ada di Majelis Rendah memberikan suara setuju dan suara tidak setuju tetap mempertahankan pendirian mereka. Pada tanggal 21 Desember 1949 diadakan

pemungutan suara dan ternyata hasil pemungutan suara tersebut yang setuju ada 34 orang dan yang tidak setuju ada 15 orang. Menurut hasil pemungutan suara tersebut maka jelaslah bahwa Undang-Undang pengakuan itu oleh Majelis Tinggi, maka Undang-Undang tersebut pada hari itu juga disahkan oleh Baginda Ratu, agar mulai berlaku dengan segera. Dengan peristiwa tersebut, maka Pemerintah Belanda dapat mengakui kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat, berdasarkan apa-apa yang telah tercapai dan Konferensi Meja Bundar (Agung, 1985: 320)

Pada tanggal 23 Desember 1949, Delegasi Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta berangkat kembali ke Nederland untuk menandatangani akte pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda (Notosusanto, 1985: 44)

Selanjutnya saat yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia khususnya dan bangsa Asia pada umumnya tiba juga. Upacara bersejarah bagi bangsa Indonesia maupun bagi Belanda terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Dimana pada tanggal tersebut berlangsung upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan yang dilakukan secara bersamaan di Indonesia maupun di negeri Belanda. (Sudharmono, 1975: 257)

Di Nederland upacara penandatanganan akte pengakuan kedaulatan itu dilaksanakan di ruang tahta Amsterdam Ratu Yuliyana Perdana Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan A. M. J. A. Sassen dan Ketua Delegasi Republik Indonesia Serikat Drs. Moh. Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangannya pada Ate "Pengakuan Kedaulatan". Pada waktu yang sama Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A. H. J. Lopink dalam suatu upacara, bersama-sama membubuhkan tanda tangannya pada naskah "Pengakuan Kedaulatan". Maka dengan berlangsungnya peristiwa tersebut, barulah secara pormil Belanda mengakui Kemerdekaan dan Kedaulatan penuh negara Indonesia diseluruh bekas Hindia Belanda kecuali Irian Barat. (Kartodirdjo, dkk., 1975: 72)

Dengan diakuinya hasil KMB yang melahirkan "Piagam Pengakuan Kedaulatan" yang telah ditanda tangani oleh para pejabat yang di tugaskan seperti penulis kemukakan di atas, mulai saat itu tanggal 27 Desember 1949 setiap bendera Belanda yang ada di Indonesia

PENGARUH PERANG KEMERDEKAAN II  
TERHADAP PENGAKUAN KEDAULATAN RI TANGGAL 27 DECEMBER 1949  
**Kuswandi**

diturunkan. (Dinas Sejarah Militer TNI-AD, 1972: 214)

Pengakuan Kedaulatan oleh Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat itu sesungguhnya merupakan pengaruh dari Perang Kemerdekaan II yang terjadi akibat Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1949.

Peristiwa penandatanganan "Naskah Pengakuan Kedaulatan" tanggal 27 Desember 1949 ini, mengakhiri suatu periode dalam babakan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka berakhir pulalah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan yang penuh dengan penderitaan dan pengorbanan yang telah menelan sekian banyak korban jiwa dan harta rakyat Indonesia.

Perjuangan dalam rangka Perang Kemerdekaan II ini telah berhasil. Kedaulatan Negara Republik Indonesia berkat perjuangan selama ini telah mendapat pengakuan. Dengan pengharapan yang meluap-luap, rakyat Indonesia dewasa ini memandang ke masa depan, ke masa-masa dimana kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan dengan pengorbanan-pengorbanan yang tidak ternilai itu akan segera diisi dengan bentuk mewujudkan masyarakat adil dan raakmur sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

1. Perang Kemerdekaan II yang terjadi sebagai reaksi terhadap Agresi Belanda II yang bertujuan untuk menghancurkan dan meniadakan Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sematamata karena ulah Belanda yang tidak merasa puas dengan hasil perundingan yang telah dicapainya melalui Renville.
2. Perang Kemerdekaan II sebagai reaksi terhadap Agresi Militer Belanda II yang terjadi sejak tanggal 19 Desember 1948, diantaranya berupa Perang Gerilya.
3. Puncak Perang Kemerdekaan II yang dilakukan melalui Perang Gerilya itu adalah berupa serangan umum 1 Maret tahun 1949.
4. Perang: Kemerdekaan II sebagai akibat dari Agresi Militer Belanda II juga mendapat

dukungan dari Bangsa Bangsa Asia melalui Konpres New Delhi yang disponsori oleh India.

5. Reaksi dari dunia sebagai akibat dari Agresi Militer Belanda ke II disalurkan melalui Sidang Dewan Keamanan PBB yang menghasilkan Resolusi Dewan Keamanan PBB.
6. Sebagai usaha untuk melepaskan diri dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, Belanda mengundang Bung Karno maupun PBB untuk segera mengadakan KMB. Dan dengan turun tangannya PBB untuk menyelesaikan masalah ini, maka terwujudlah persetujuan Roem-Royen yang bertempat di Jakarta.
7. Konperensi Antar Indonesia antara pihak Republik dengan BFO juga merupakan pengaruh dari Perang Kemerdekaan II. Konperensi tersebut dilakukan dua kali dengan tujuan mengadakan dialog antara pemimpin Republik dengan BFO agar tercapai kata sepakat tentang persoalan-persoalan yang sangat mendasar untuk menghadapi KMB.
8. Sebagai Realisasi dari KMB, peristiwa yang sangat bersejarah. sesudahnya adalah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949.

## **Rekomendasi**

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian berikutnya. Dapat melengkapi khasanah keilmuan sejarah bangsa yang harus dilestarikan.

1. Alangkah lebih baiknya, bila para pembaca lebih menghayati makna yang terkandung dari peristiwa Perang Kemerdekaan II
2. Alangkah lebih baiknya bila para pembaca tulisan-tulisan sejarah di Indonesia ini, dapat memberikan masukan-masukan dan dapat menunjukkan peninggalan-peninggalan sejarah serta dapat melestarikannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Haris Nasution. 1983. Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid II, Kenangan Masa Gerilya. Jakarta: Gunung Agung.
- Abdul Haris Nasution. 1980. Pokok pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia

- di Masa Yang Lalu dan Yang Akan Datang. Bandung: Angkasa.
- Abdul Haris Nasution. 1971. Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid IX. Bandung: Disjarah AD dan Angkasa.
- Adam Malik. 1978. Mengabdikan Republik, Jilid II, Angkatan 45. Jakarta: Gunung Agung.
- Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat. 1972. Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat. Jakarta" Disjarah TNI-AD dan Fa. Mahjuma.
- Dinas Sejarah Militer Kodatn VI Siliwangi. 1968. Siliwangi dari Masa ke Masa. Jakarta.
- Isjwara, F. 1974. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Binacipta.
- Ide Anak Agung Gde Agung. 1985. Renville. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Mohamad Roem. 1977. Bunga Rampai dari Sejarah. Jilid IL Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukayat. 1985. Haji Agus Salim The Grand Old Man of Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Terpadu.
- Nugroho Notosusanto. 1985. Ikhtisar Sejarah RI 1945 - Sekarang. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanaa, Pusjarah ABRI.
- Nugroho Notosusanto, dkk. 1986. Sejarah Nasional. Jilid III Untuk SMA. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.
- Nalenan. 1981. Arnold Mononutu Potret Seorang Patriot. Jakarta: Gunung Agung.
- Purnawan Tjondronegoro. 1986 Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku. Jakarta: Balai Pustaka.